

## BAB III

### Perlakuan SAK Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik

#### A. Tujuan Standar Akuntansi

Pembentukan standar di dunia akuntansi tidak dilakukan tanpa makna serta tujuan yang ada didalamnya atau dibuat begi saja. Akan tetapi, tujuan dibentuknya sebuah standar pada akuntansi yaitu untuk penyamaan atau penyeragaman laporan keuangan dan mempermudah bagi akuntan untuk menyusun sebuah laporan keuangan. Bukan hanya itu, namun juga mempermudah pembaca serta auditor dalam memahami serta bisa membedakan dari perbandingan dari masing-masing entitas laporan keuangan yang jelas saja tentunya berbeda.

Oleh karena itu tentunya terciptanya standar pada akuntansi keuangan, tentunya suatu laporan keuangan yang telah tersedia diseluruh dunia mempunyai pedoman menyusun dalam bentuk yang sama atau seragam. Sehingga tidak akan terjadi seorang akuntan yang membuat laporan keuangan atas keinginan dan pedomannya sendiri.

#### B. Jenis Standar Akuntansi

Tepatnya di Indonesia, Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dibagi menjadi 4 jenis. Jenis standar ini memiliki pernyataan standar akuntansi. Berikut 4 jenis standar akuntansi tersebut sebagai berikut :<sup>7</sup>

a. SAK IFRS (SAK Umum)

SAK tersusun atas menyesuaikan dari *International Financial Reporting Standards* (IFRS). SAK tersebut tersusun dikhususkan bagi organisasi yang sudah mempunyai akuntabilitas publik. Manfaat suatu penggunaan SAK IFRS yaitu meningkatkannya perbandingan pada laporan keuangan, berkurangnya

---

<sup>7</sup> Syaiful Bahri, S.E, M.S.A. *Pengantar Akuntansi Berdasarkan SAK ETAP dan IFRS*. (Yogyakarta : CV. Andi Offset. 2016). Hlm. 7.

biaya pelaporan keuangan bagi perusahaan multinasional, menghilangkan hambatan arus modal internasional, dan memberi informasi kualitas di pasar modal internasional. SAK IFRS dengan harus diterapkan dalam entitas dengan akuntabilitas publik, dengan contoh perbankan, asuransi, emiten, BUMN, serta perusahaan publik.

b. SAK ETAP

Entitas tanpa akuntabilitas publik yaitu mengeluarkan laporan keuangan dengan manfaat umum untuk pengguna eksternal. Pada penggunaan eksternal tersebut yaitu pemilik yang sama sekali tidak terlibat secara langsung didalam lembaga pemeringkat kredit, kreditur, dan pengelola usaha. Badan usaha yang termasuk dalam SAK ETAP ialah persekutuan, Firma, perorangan, *Commanditaire Vetnootschap (CV)*, koperasi, dan perseroan terbatas yang tidak memiliki SAK ETAP secara berarti. Laporan keuangan difokuskan untuk pemenuhan dalam kebutuhan bersama. Pada laporan keuangannya SAK ETAP terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan.

Bagi perusahaan kecil dan menengah diharapkan mampu dalam menyusun laporannya sendiri dan dapat diaudit, seperti halnya terdapat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) akhirnya bisa menggunakan laporan keuangannya selama beroperasi dan dapat dikontrol dengan jelas demi pengembangan usaha pada BUMDes.

c. SAK Syariah

SAK Syariah ialah standar akuntansi keuangan yang dipergunakan entitas dalam kegiatan transaksi secara syariah, baik dalam perspektif syariah maupun nonsyariah. Pada kegiatan muamalah (transaksi syariah) berlaku umum prinsip syariah dengan mengikat secara hukum bagi yang melaksanakan transaksi syariah. Laporan Keuangan Syariah merupakan laporan keuangan yang telah diciptakan atas entitas syariah yang

dimanfaatkan dengan perbandingan laporan keuangan syariah lainnya maupun yang terdahulu. Komponen dalam laporan syariah tersusun atas neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, catatan atas laporan keuangan, laporan sumber serta penggunaan dana zakat.

d. SAK Pemerintah

SAP dituangkan pada model Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP), dan disertai atas Pengantar Standar Akuntansi Pemerintah tersusun dengan mengarah pada Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah (KKAP). Dengan demikian maka keharusan SAP dipergunakan kedalam penyusunan laporan keuangan pemerintah, baik pada pemerintah daerah atau pun pusat.

### C. Sediaan

a. Definisi Sediaan

Sediaan merupakan aktiva yang tersedia selanjutnya digunakan untuk usaha normal. Pada produksinya, sedang pada perjalanan maupun berbentuk bahan baku atau perlengkapan yang dipergunakan pada kegiatan suatu produksi maupun dalam tambahan materi.<sup>8</sup> Dapat disimpulkan dari pengertian tersebut bahwa persediaan ialah aset yang telah menjadi miliknya yang bertujuan demi keberlangsungan kepentingan penjualan dengan tujuan agar dapat ke dalam operasional usaha yang normal, baik itu pada perusahaan dagang atau pun pada perusahaan manufaktur yang di dalamnya butuh cara publikasi.

---

<sup>8</sup> Sukrisno Agoes, Estralita Trisnawati. *Akuntansi Perpajakan Edisi 3*. (Jakarta : Salemba Empat. 2013). Hlm. 53.

## b. Jenis Persediaan

Berikut 5 jenis persediaan dalam perusahaan manufaktur, yaitu :

### 1. Bahan baku dan bahan pelengkap

Jadi, bahan baku diberbedakan dari bahan baku langsung dan bahan baku pembantu. Bahan baku langsung sendiri diartikan sebagai bahan baku utama untuk produk. Contoh : kayu sebagai bahan baku meja.

Sedangkan bahan baku pelengkap merupakan bahan baku dengan keberadaannya sulit diidentifikasi dalam suatu produk.

Contoh : minyak plitur.

### 2. Barang dalam pengolahan

Barang dalam pengolahan merupakan barang dengan keberadaannya sedang pada tahap akhir atau selesai dan memerlukan biaya tenaga dan biaya lainnya untuk menyelesaikannya.

### 3. Barang jadi

Barang jadi artinya suatu barang yang telah selesai dari tahap penyelesaian atau pengolahan yang siap untuk dipasarkan. Artinya, telah selesai dibebankan atas biaya tidak langsung, biaya tenaga kerja serta biaya bahan baku.

### 4. Barang dalam perjalanan

Artinya barang dalam perjalanan ialah barang yang telah dikirim dengan dasar *FOB Shipping Point* yang terletak pada perjalanan masa di akhir periode dengan memperhitungkan dalam catatan pembeli yang artinya menjadi milik pembeli.

### 5. Barang konsiyansi

Barang konsiyansi ialah suatu barang tersebut yang telah diberikan untuk *consignee*, akan tetapi juga wujud kepemilikan dari *consignor* berikutnya

digolongkan ke dalam persediaan consignor senilai harga beli dan harga produksi.<sup>9</sup>

c. Sistem Pencatatan Persediaan

Dalam sistem pencatatan persediaan ada 2 macam sistem, yaitu :<sup>10</sup>

1. Sistem Periodik

Setiap pembelian pada sistem periodik dicatat pada akun "pembelian" sedangkan pada penjualan dicatat dengan "penjualan". Dengan penentuan HPP perusahaan di waktu akhir periode akuntansi dengan rumusan :

$$\text{Persediaan Awal} + \text{Pembelian (neto)} - \text{Persediaan akhir} = \text{Harga Pokok Penjualan}$$

Saat di masa akhir periode persediaan dihitung dengan cara perhitungan secara fisik. Lalu, hasil dari perhitungan tersebut digunakan untuk menghitung HPP yang selanjutnya digunakan untuk menyusun sebuah laporan keuangan. Sehingga atas cara sistem periodik ini perhitungan persediaan bisa diketahui dengan baik. Namun selain hal di atas, sistem periodik ini tidak cocok apabila jumlah dari jenis persediaan sangat banyak. Hal tersebut disebabkan langkah ini tergolong sangat mahal. Jadi sistem periodik ini pas jika digunakan kepada sebuah perusahaan dengan jumlah dan jenis persediaannya tidak terlalu banyak.

2. Sistem Perpetual

Berbeda dari sistem periodik, pada sistem perpetual dalam setiap pencatatannya dilaksanakan secara berkelanjutan dengan tiap kali pembelian dan penjualan barang dagang dicatat dengan akun

---

<sup>9</sup> Sukrisno Agoes, Estralita Trisnawati. *Akuntansi Perpajakan Edisi 3*. (Jakarta : Salemba Empat. 2013). Hlm. 55.

<sup>10</sup> *Ibid*. Hlm. 55.

“persediaan”. Sebuah perusahaan tersebut dalam menentukan HPP pada setiap kali penjualan dilakukan. Dalam sistem periodik hal ini bisa mengetahui uraian tentang persediaan dan HPP tanpa hitungan fisik dan terus-menerus. Untuk melakukan pengawasan persediaan serta untuk memastikan HPP lebih akurat, perusahaan sering melakukan perhitungan fisik, walaupun pada sistem perpetual hal tersebut tidak di syaratkan.

#### **D. Properti Investasi**

- a. Definisi dan Pengakuan Awal  
Properti Investasi merupakan properti dalam wujud aset dengan berupa tanah dan bangunan atau sebagian dari suatu bangunan atau keduanya dengan diprakarsai secara penuh atas *lessee* atau pemilik melalui sewa dalam hal pembiayaan dengan artian bertujuan menciptakan sewa atau sebagai menaikkan nilai atau keduanya, akan demikian hal tersebut tidak dipergunakan pada proses penyediaan jasa, barang, bertujuan administratif atau bahkan di jual untuk kepentingan usaha dalam setiap harinya.
- b. Pengukuran Pada Saat Awal  
Pada saat pengakuan awal properti investasi terukur pada saat biaya perolehannya, lalu selanjutnya ketika biaya perolehan yang bersumber properti investasi yang dibeli ialah terdiri atas harga pembelian serta setiap pengeluaran yang mampu didistribusikan secara langsung, seperti biaya pajak pengalihan, biaya legal dan broker dan biaya transaksi lainnya. Lalu suatu biaya properti investasi yang dikonstruksi individu ditetapkan secara perpedoman dari peraturan yang telah ditetapkan atau yang sudah ada.
- c. Pengukuran Setelah Pengakuan Awal  
Pada saat setelah pengakuan awal, artinya semua properti investasi diharuskan diukurkan atas biaya perolehan

- dikurangi akumulasi penyusutan serta resensi penerunanan nilai sebagai mana siatur dalam Aset Tetap dan pembuatan pengungkapan yang telah di syaratkan.
- d. Selanjutnya apabila properti tersebut telah memenuhi dari sebuah definisi properti investasi maka suatu entitas diharuskan mengirim properti kepada properti investasi.

## **E. Aset Tetap**

### **a. Definisi Aset Tetap**

Aset tetap ialah aset berwujud tentunya dipergunakan dan tentunya aset tersebut telah dimiliki yang digunakan untuk produksi serta dalam penyediaan suatu barang atau jasa dengan caara penyewaan ke pihak lainnya atau dengan cara digunakan atas tujuan administratif dan hal tersebut diharap mampu digunakan dalam terlebih dari satu periode..

### **b. Perolehan Aset Tetap**

Aset tetap yang didapat dari pembelian dalam wujud siap pakai lalu selanjutnya dicatat dengan cara jumlah harga beli ditambahkan pada biaya yang terjadi pada saat perolehan, lalu kemudian keseluruhan yang berikan ke aset pada saat kali awal diakuinya kesesuaiannya dengan SAK ETAP. Jadi biaya tersebut seperti biaya pemasangan, biaya bongkar pengiriman, biaya bongkar muat dan biaya lain-lain yang ditambahkan didalam harga perolehan. Kemudian setiap potongan rabat dan dagang dikurangkan dari harga perolehan.

### **c. Penyusutan Aset Tetap**

Pada SAK ETAP yang telah ditetapkan oleh IAI (2009 :71-73), adapun metode penyusutan yang bisa dipergunakan yaitu :<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Sukrisno Agoes, Estralita Trisnawati. *Akuntansi Perpajakan Edisi* 3. (Jakarta : Salemba Empat. 2013). Hlm. 132.

- a) Metode garis lurus, dengan menciptakan pembebanan tetap selama umur manfaat aset apabila nilai residu tersebut tidak berubah.
- b) Metode saldo menurun, dengan menciptakan beban yang turun selama umur manfaat aset.
- c) Metode jumlah unit produksi, dengan menciptakan beban pada *ouput* yang diharapkan pada suatu aset.
- d. Pertukaran Aset Tetap  
Suatu biaya perolehan dapat diketahui pada nilai wajar apabila pada aset tetap didapatkan dengan cara penukaran dengan kombinasi aset nonmoneter atau aset moneter, melainkan :
  - a) Transaksi pertukaran tidak memiliki subdtansi komersial.
  - b) Biaya perolehan terukur pada total tercatat aset yang telah diberikan, karena suatu nilai wajar aset yang diberikan atau diterima tidak bisa diukur secara andal.

## **F. Pendapatan**

### **a. Definisi Pendapatan**

Pendapatan merupakan pemberian atas suatu produk yang telah terukur dengan dasar penghargaan suatu produk. Artinya tanpa kita sadari, produk dari suatu perusahaan merupakan hasil dari usaha yang produktif. Pengukuran pendapatan bisa dilakukan atas penjumlahan dari pemberian dari pelanggan dengan rupiah aset baru.<sup>12</sup> Biasanya pendapatan ini diukur terlebih dulu dan kemudian biaya dihitung atau diperkirakan dengan menghasilkan suatu pendapatan tersebut sehingga labanya bisa diketahui. Dengan demikian dalam laba-rugi pendapatan disajikan terlebih dahulu lalu dikurangi biaya.

---

<sup>12</sup> Suwardjono. *Teori Akuntansi Perencanaan Pelaporan Keuangan*. (Yogyakarta : BPFY-Yogyakarta. 2016). Hlm. 351.

b. Pengakuan Pendapatan

Pengakuan merupakan pencatatan nominal rupiah dengan resmi dalam sistem akuntansi, dengan demikian pada jumlahan tersebut refleksi pada sistem keuangan. Definisi pendapatan harus dibedakan atas pengakuan pendapatan, dan hal tersebut pada suatu jumlah telah memenuhi definisi dari pendapatan itu sendiri atas jumlah yang telah disetujui sebagai pendapatan.

Pada pengakuan pendapatan penyimpangan tidak dibolehkan dilakukan dari dasar konseptual. Dengan landasan tersebut pendapatan hanya diakui bila sudah memenuhi kualitas keterandalan dan terukur. Dengan demikian, kualitas tersebut harus dioperasionalkan kepada kriteria pengakuan pendapatan.

c. Pembentukan Pendapatan

Pembentukan pendapatan ialah sesuatu konsep yang erat dengan problema pendapatan yang terjadi. Dalam konsep pembentukan pendapatan mengatakan pendapatan terhimpun, terbentuk dan berhak dengan merekat pada seluruh proses operasi pada suatu perusahaan.<sup>13</sup> Artinya, pada suatu pendapatan dianggap telah tersusun dengan seiringnya berjalan operasional pada perusahaan yaitu sebelum penjualan terjadi. Dalam konsep pembentukan disebut dengan pendekatan proses pembentukan pendapatan (*earning process aproach*).

Landasan pendakatan ini yaitu konsep dasar proses atas pencapaian dan kontuitas usaha. Pada pendapatan merepresentasikan atas pencapaian sedangkan biaya merepresentasikan upaya atau usaha. Sebuah perusahaan pasti mempunyai tujuan yaitu memperoleh laba yang sebanyak-banyaknya, sedangkan seorang pengusaha atau manajemen selalu mengharapkan biaya yang lebih kecil daripada pendapatan. Dengan adanya tujuan-tujuan tersebut maka pelaku usaha akan berusaha dengan keras.

---

<sup>13</sup> *Ibid.* Hlm. 363.

d. Realisasi Pendapatan

Pada konsep realisasi, transaksi penjualan atau kontrak mengakibatkan pendapatan yang sebenarnya. Artinya jika pendapatan belum terbentuk atau belum terjadi apabila belum terlaksananya kontrak atau transaksi. Dalam pengakuan pendapatan konsep dalam penghimpunan dan realisasi diakui sangat berarti. Karena dalam rencana perwujudannya lebih ada kaitannya dengan masalah pengukuran pada pendapatan dengan lebih bersifat kriteria pengakuan cara yang objektif.

e. Kriteria Pengakuan Pendapatan

Pada konsep dasar dalam mengupayakan serta memperhatikan hasil bahwa tidak ada pendapatan dalam upaya. Artinya, hal ini pendapatan belum bisa diakui apabila sebelum terjadinya upaya yang cukup. Oleh karena itu dalam pemenuhan kualitas terukur dan rehabilitasi dalam pemenuhan landasan konsep dan upaya hasil, kriteria pada pengakuan pendapatan sendiri didasarkan atas 2 konsep yaitu dapatnya mengakui pendapatan dan pembentukan pendapatan dengan mengkonfirmasi realisasi.

## **G. Biaya Pinjaman**

Pada biaya peminjaman ini merupakan bentuk bunga dan biaya-biaya yang lain muncul berasal dari suatu kewajiban keuangan atas suatu entitas. Artinya, pada pengakuan suatu entitas harus mengaku keseluruhan biaya pinjaman sebagai beban dalam laporan laba rugi. Dengan pengungkapan suatu entitas harus mengungkapkan bearnnya suatu biaya pinjaman. Cangkupan biaya pinjaman ialah, antara lain :

- a. Bunga yang digunakan guna cerukan bank dan pinjaman jangka panjang dan pendek.
- b. Premium atau amortisasi diskonto yang terkait pinjaman.
- c. Amortisasi pada biaya tambahan yang timbul karena suatu proses perijinan pada saat meminjam.

- d. Beban pembiayaan yang sama dengan sewa pembiayaan yang telah disesuaikan dan diakui adanya.
- e. Pinjaman pada mata uang asing yang memunculkan perbedaan pada nilai tukar dengan perbedaan yang diakui terhadap biaya bunga sebagai penyesuaian.